

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S., Hukum, F., & Muhammadiyah, U. (2017). *Jurnal hukum replik*. 5(2), 157–171.
- Fachmi. (2011). *KEPASTIAN HUKUM MENGENAI PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA*.
- Marwan Mas. (2014). *PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*.
- Ruslan Renggong. (2017). *HUKUM PIDANA KHUSUS MEMAHAMI DELIK DELIK DILUAR KUHP*.
- Santoso, Listiyono & Meyrasyawati, D. (2015). MODEL STRATEGI KEBUDAYAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawati. *REVIEW POLITIK*, 5(2), 22–45.
- Soerjono Soekanto. (2015). *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*.
- Syaputra, S. (2017). Implikasi Perumusan Delik Korupsi Di Dalam Kebijakan Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Fiat Justisia*, 9(3), 353–364. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.605>
- Teguh Prasetyo. (2015). *HUKUM PIDANA*.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–182.

UNDANG-UNDANG DAN KUHP

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP
4. KUHP PASAL 413 TENTANG KEJAHATAN JABATAN